

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Tannia Regina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Correspondence author: Tannia Regina, tannia.regina300689@gmail.com, Depok, Indonesia

Abstract

This study aimed to analyze and determine how much influence inflation, unemployment, and investment on economic growth in Indonesia from 1986-to 2014. This study uses secondary data in the form of time-series data from 1986-to 2014, which by Gross Domestic Product (GDP) as an indicator of economic growth, inflation, unemployment, and investment. The analytical method used is multiple linear regression or ordinary least squares (OLS). Based on the analysis found that inflation does not affect economic growth. While unemployment positive and significant effect on economic growth. Similarly, positive and significant investment. Therefore, the government should expand employment and employment to reduce unemployment in Indonesia.

Keywords: economic growth, inflation, unemployment, investment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi, pengangguran, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1986-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data *time series* tahun 1986–2014, yaitu data Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan investasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda atau Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula investasi berpengaruh positif dan signifikan. Untuk itu pemerintah hendaknya memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai Modern Economic Growth. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses

pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain laju pertumbuhan, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi wilayah adalah melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menghasilkan output (barang dan jasa) diperlukan input dalam proses produksi yaitu berupa modal dan tenaga kerja yang dijelaskan dalam teori pertumbuhan Solow-Swan yang didasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Faktor produksi ini terdiri dari modal, tenaga kerja, dan teknologi sebagai faktor eksogen (Kuncoro, 2010). Investasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan menyelenggarakan belanja modal setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja modal selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Tahun 2010 belanja modal yang ditargetkan mencapai 3,2 triliun rupiah, kemudian tahun 2011 pemerintah menambah belanja menjadi 4,7 triliun rupiah. Kemudian tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 1,9 triliun rupiah, dan di tahun 2013 belanja modal mencapai angka 7,4 triliun rupiah. Pada periode 2014 total belanja modal yang dikeluarkan pemerintah adalah sebanyak 9,2 triliun rupiah.

Selain melalui belanja modal, upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi daerah adalah dengan menarik investor domestik maupun investor asing. Hasil usaha pemerintah dalam menarik investor dapat dilihat dari realisasi investasi

swasta berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipublikasikan oleh Badan Kegiatan Penanaman Modal.

Realisasi investasi swasta di Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan menuju arah positif dari tahun 2010 sampai akhir tahun 2013. Kemudian, sepanjang tahun 2014 perkembangan investasi menurun drastis sebesar 12,1 triliun rupiah. Menurut Bank Indonesia (2014) perlambatan investasi ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah di tahun 2014. Terbatasnya permintaan ekspor dari pasar-pasar tradisional (USA dan Eropa) serta memburuknya perekonomian Tiongkok mempengaruhi tingkat permintaan ekspor dari Jawa Tengah. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kemudian mendorong investor untuk menahan investasinya di tahun berjalan.

Etika para investor menanamkan modalnya di Indonesia, lapangan kerja terbuka bagi calon tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Tenaga kerja yang berproduktivitas tinggi menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat. Menurut Dumairy (1996), penduduk memiliki dua fungsi yaitu sebagai pelaku ekonomi dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Todaro (2006) mengatakan bahwa populasi yang lebih besar merupakan pasar potensial yang menjadi sumber permintaan berbagai macam barang dan jasa yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia, sebagai suatu negara yang sedang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2004-2014 terus mengalami fluktuasi. Fluktuasi PDB tertinggi Indonesia terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,98% dan yang paling rendah pada tahun 2009 sebesar 4,54%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 disebabkan kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak ringan pada tahun 2009. Tantangan tersebut cukup berat terutama pada awal tahun 2009, akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan terakhir tahun 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Kondisi ini mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan pertama 2009 masih mengalami tekanan berat, sementara pertumbuhan ekonomi masih dalam tren menurun akibat kontraksi ekspor barang dan jasa yang cukup dalam.

Ekspor dan penerimaan pajak memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Agregasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam perekonomian merupakan nilai Produk Domestik Bruto. Pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Selain ekspor dan penerimaan pajak, nilai tukar juga berpengaruh terhadap besaran pertumbuhan ekonomi. Dalam perekonomian terbuka, tingkat pertumbuhan juga akan dipengaruhi oleh nilai tukar. Pengaruh nilai tukar terhadap tingkat

pertumbuhan dapat dilihat baik melalui jalur aggregate supply (AS), yakni melalui pembentukan capital, maupun melalui aggregate demand (AD), yakni melalui transaksi perdagangan internasional dan investasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ekspor, penerimaan pajak dan nilai tukar secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut Kuznets (dalam Sukirno 2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith Dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi Sukirno (2006:132-137).

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini

mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya penambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*).

4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Tahun 2010 di Pulau Sulawesi terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan disbanding tahun sebelumnya dari 0,34 menjadi 0,39. Ini menunjukkan perubahan kriteria ketimpangan pendapatan dari ketimpangan rendah ke ketimpangan sedang. Namun pada tahun 2010 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah lainnya akan memicu terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan (Brata, 2002). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai dari tahun 2001 merupakan sebuah gebrakan (*big bang*) dari semula pemerintahan yang bersifat sentralistis menjadi pemerintahan yang desentralistis. daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Mangkoesoebroto, 2001).

Berdasarkan fenomena diatas, untuk membuktikan sejauh mana pengaruh masing-masing variabel dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (data.go.id,2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (BPS,2020a) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

1. umur panjang dan hidup sehat
2. pengetahuan
3. standar hidup layak

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, (BPS, 2020b) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran (BPS, 2020c) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu Negara.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (Riadi, 2020) adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Indeks Gini dapat menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Selain itu, Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor dan negara. Indeks Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga mampu menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, di mana yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, dan sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berasal dari Badan Pusat Statistik yang telah dipublikasikan saat penulis akses pada Juli 2020. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan

dokumen-dokumen yang sudah ada serta berhubungan dengan variabel penelitian seperti data yang berasal dari Badan Pusat. Data yang dipergunakan adalah:

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja dari provinsi di Indonesia, tahun 2018
2. Indeks pembangunan manusia dari 34 provinsi di Indonesia, tahun 2018
3. Tingkat kemiskinan dari 34 provinsi di Indonesia, tahun 2018
4. Tingkat pengangguran dari 34 provinsi di Indonesia, tahun 2018
5. Ketimpangan pendapatan dari 34 provinsi di Indonesia, tahun 2018

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003:178). Dengan kata lain ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Fiskal daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara derajat otonomi fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh derajat otonomi fiskal daerah. Kondisi ini dikarenakan semakin besar kekuatan derajat otonomi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sebab derajat otonomi fiskal memberikan ruang untuk daerah bisa menggunakan anggaran dengan lebih produktif.

Secara parsial, rasio pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara rasio pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh rasio pajak di Indonesia.

Hal ini dikarenakan apabila penurunan di dalam tarif pajak akan mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja, menabung dan menginvestasikan uangnya yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perekonomian yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Sebaliknya apabila pajak meningkat maka akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap produksi barang dan jasa juga menjadi turun. Penurunan ini akan menurunkan kegiatan perekonomian.

Secara parsial, investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi. Hal ini disebabkan apabila terjadi kenaikan terhadap investasi di Indonesia maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mengalami kenaikan, sebab kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan karena penurunan investasi mengindikasikan telah terjadinya penurunan penanaman modal atau pembentukan modal. Penurunan penanaman modal atau pembentukan modal ini akan mengakibatkan perekonomian menurunkan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal yang dianggarkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan. Adanya hubungan positif ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah sudah digunakan secara efisien serta terserap dengan baik. Belanja modal yang dialokasikan dengan baik akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Manfaat ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan dapat dirasakan dari kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik serta infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan produksi dalam perekonomian.

Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya hubungan negatif antara variabel investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini disebabkan oleh nilai investasi PMA dan PMDN tidak sesuai dengan rencana jumlah proyek yang sudah disetujui. Berdasarkan data dari Badan Kegiatan Penanaman Modal, terdapat beberapa daerah pada tahun tertentu yang nilai investasinya nol, artinya belum ada proyek yang berjalan. Selain itu, ada beberapa daerah yang proyeknya berhenti di tengah jalan ditandai dengan rendahnya nilai investasi jika dibandingkan dengan jumlah proyek yang direncanakan pada tahun berlaku. Kondisi ini memberikan dampak beban terhadap perekonomian daerah sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya hubungan yang signifikan antara variabel penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian disebabkan hampir setengah populasi penduduk sudah terserap dalam lapangan kerja yang berbasis

produktivitas tinggi. Selain itu, produktivitas yang tinggi tersebut diikuti oleh meningkatnya permintaan barang dan jasa hasil kegiatan produksi oleh masyarakat sehingga memicu pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik dari segi produksi maupun konsumsi.

Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Lamanya rata-rata tahun sekolah yang dihabiskan masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan positif antara variabel pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa semakin besarnya rata-rata tahun yang dihabiskan penduduk untuk menyelesaikan pendidikan formal dasar dan menengah akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah seseorang yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi akan memiliki kemampuan, kreativitas, disiplin, dan pengetahuan yang dapat menunjang pekerjaannya dikemudian hari.

Pengaruh Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Fasilitas kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif yang ada antara variabel fasilitas kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya fasilitas kesehatan berupa unit rumah sakit dan puskesmas dapat memicu penurunan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini disebabkan karena banyaknya puskesmas yang berhenti beroperasi pada kurun waktu 5 tahun penelitian. Anggaran pemerintah untuk menunjang sarana kesehatan hanya digunakan untuk memperbanyak jumlah, namun usaha menjaga keberlangsungan

kegiatan operasional masih minim. Dampaknya adalah penurunan aksesibilitas masyarakat sehingga mempengaruhi kesejahteraan yang merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan produksi.

Pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain laju pertumbuhan, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi wilayah adalah melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain melalui belanja modal, upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi daerah adalah dengan menarik investor domestik maupun investor asing. Hasil usaha pemerintah dalam menarik investor dapat dilihat dari realisasi investasi swasta berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipublikasikan oleh Badan Kegiatan Penanaman Modal.

Selain ekspor dan penerimaan pajak, nilai tukar juga berpengaruh terhadap besaran pertumbuhan ekonomi. Dalam perekonomian terbuka, tingkat pertumbuhan juga akan dipengaruhi oleh nilai tukar. Pengaruh nilai tukar terhadap tingkat pertumbuhan dapat dilihat baik melalui jalur aggregate supply (AS), yakni melalui pembentukan capital, maupun melalui aggregate demand (AD).

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi tingginya ketimpangan pendapatan adalah kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan sebaliknya. Namun pada tahun 2010 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan Model Partial Adjustment Model (PAM), dapat diambil kesimpulan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia selama periode penelitian tahun 1986-2014. Produk Domestik Bruto disini digunakan sebagai indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi Indonesia yang rata-rata di bawah 10% merupakan kategori inflasi rendah yang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel independen lainnya yaitu pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang naik tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya sebagian masyarakat. Banyaknya perusahaan yang berdiri yang seharusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun justru di penuhi oleh industri yang padat modal sehingga pengangguran tidak terserap secara maksimal. Variabel investasi pun demikian. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar (Todaro,2004) yang menyatakan bahwa untuk menumbuhkan perekonomian maka diperlukan investasi baru sebagai tambahan stok modal.

Hubungan antara variabel dependen terhadap Pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang signifikan dengan hipotesis yang diajukan, dengan melihat nilai koefisien masing-masing variabel. Menunjukkan hubungannya sangat kuat diantara variabel independen lainnya ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, mengingat pertumbuhan laju angkatan kerja yang ada di Indonesia sangat tinggi.

Variabel derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, apabila derajat otonomi fiskal daerah dan investasi mengalami peningkatan sedangkan rasio pajak turun maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia secara signifikan. Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM akan menyebabkan peningkatan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kebijakan-kebijakan yang dapat disarankan adalah pemerintah daerah masing-masing provinsi diharapkan memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan ketimpangan distribusi pendapatan maka pemerintah diharapkan mampu memfokuskan sasaran kebijakan yang tepat yakni memacu pertumbuhan dengan memperhatikan distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses modal dan kesempatan kerja (mendorong meningkatnya sektor riil yang berorientasi masyarakat menengah kebawah seperti UMKM yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Meningkatkan pengeluaran pemerintah pada pengeluaran produktif seperti pembangunan kawasan usaha yang strategis guna meningkatkan jumlah investasi sebagai modal pembangunan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imamul & Gina, Hadi. (2009). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE – YKPN.
- Asfia, Murni. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Bawuno, E. Elizabeth, J.B. Kalangi, dan J. I. S. (2015). Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15, 245–254.
- Boediono. (2005). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Chatami, F. D. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 1991- 2012. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ibnurrasyad, Z. (2016). *Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Idris, Muhammad. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krugman, Paul R. (2005). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Indeks.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makro Ekonomi*, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Octavianingrum, D. (2015). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kabupaten/Kota*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Riyandani, R. Y. (2010). *Analisis pengaruh investasi swasta, investasi pemerintah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia periode 2001- 2006*. Universitas Airlangga.
- Rudriger, Dornbush. (2006). *Ekonomi Makro*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Simanjutak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Son, Liana, G. Georgiana Noja, Mihai Ritivoiu, dan R. T. (2013). *Education and economic growth: an empirical analysis of interdependencies and impacts based panel data*. *Timisoara Journal of Economics and Business*, 6, 39–54.
- Subri, M.(2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardji, Untung. (2005). *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutawijaya. (2008). *Pengaruh Ekspor dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 1. Hal 1-19.
- Todaro, M.P. (2005). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Untoro, Joko. (2010). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kawah Media